

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi permasalahan sosial ekonomi yang sering terjadi pada negara-negara di dunia baik di negara-negara berkembang maupun dinegara maju. Kemiskinan yang dipandang dari sudut ekonomi dilihat sebagai ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hariannya, juga bisa diartikan bahwa pendapatan seseorang yang jauh lebih rendah dari biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan harian, baik konsumsi, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang baik. Sedangkan apabila dipandang dari sudut social, kemiskinan adalah permasalahan social yang biasanya dikaitkan dengan rendahnya Pendidikan, rendahnya keahlian yang dimiliki ataupun tingkat kriminalitas local seperti pencurian dan pemalakan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup (Yustie, 2017).

Beberapa langkah instan yang sering digunakan oleh beberapa negara dalam upaya menekan angka kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai, baik dalam bentuk bahan makan pokok maupun uang tunai. Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa negara juga melakukan program-program pengentasan kemiskinan dengan berbagai pelatihan dan pendidikan serta menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak (Fithri & Kaluge, 2017).

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi masalah yang belum menemukan solusi terbaik dalam mengatasinya, hal ini tidak terlepas karena negara Indonesia sebagai negara berkembang dan juga negara kepulauan sehingga upaya pengentasan kemiskinan seringkali belum terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Sejauh ini upaya dari pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai macam program baik yang bersifat instan maupun yang bersifat jangka panjang melalui pendidikan dan pelatihan serta penyediaan lapangan kerja sebagai langkah yang efektif di berbagai daerah (Amalia, 2015).

Beberapa daerah di Indonesia yang masih tinggi tingkat kemiskinannya diantaranya tesebar di Indonesia bagian timur dimana provinsi Papua dan Papua

Barat menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Provinsi Papua menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia sedangkan Provinsi Papua Barat menempati urutan kedua sebagai provinsi termiskin di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Papua dan Papua Barat Tahun 2015-2021

	Jumlah Penduduk Papua dan Papua Barat						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	859,15	911,33	897,69	917,63	926,36	911,37	920,44
Papua Barat	225,36	225,81	228,38	214,47	211,50	208,58	219,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Berdasarkan tabel jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam kurun waktu 2015 hingga 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua cenderung meningkat di setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua mencapai 859,15 juta jiwa sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi 911,37 juta, dan 2021 meningkat mencapai 920,44 angka ini menjadi angka tingkat kemiskinan provinsi tertinggi di Indonesia. Selanjutnya di urutan kedua adalah Provinsi Papua Barat, tingkat kemiskinan Provinsi Papua Barat menempati urutan kedua sebagai provinsi termiskin di Indonesia, berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) dimana tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebsanyak 225,36 juta jiwa, angka ini terus mengalami penurunan disetiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan dimana pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebanyak 219,07 juta jiwa.

Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah termiskin di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal, yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Papua, beberapa hal yang melatarbelakangi diantaranya kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak masih rendah, akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi juga masih rendah. Sarana dan infrastruktur yang belum merata menjadi factor utama tingginya harga komoditas bahan-bahan kebutuhan konsumsi menjadi lebih mahal. Tingkat korupsi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah juga menambah beban daerah.

Berdasarkan data yang bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Provinsi Papua dan Papua Barat masuk kedalam 10 Provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia pada tahun 2021.

Beberapa upaya pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat dalam upaya menekan angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat dirasa kurang terlalu efektif, hal ini dikarenakan seringkali bergantinya rezim pemerintahan merubah arah pembangunan di Papua dan Papua Barat sehingga dampak jangka panjang dari pembangun selalu menjadi hal yang kurang dirasakan oleh masyarakat Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah yang terkanal miskin sebenarnya menyimpan banyak potensi-potensi ekonomi yang sangat besar, sumber daya alam yang banyak dan belum tereksplorasi menjadi potensi Papua dan Papua Barat dimasa depan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika tahun 2021 laju Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 1.2 Pertumbuhn Ekonomi Papua dan Papua Barat Thun 2020-2021

	Pertumbuhan Ekonomi Papua dan Papua Barat	
	2020	2021
Papua	198,93	235,34
Papua Barat	83.566,22	85.072,86

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistika, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2020 mencapai Rp 198,93 miliar, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp 235,34milliar. Berbanding terbalik dengan Provinsi Papua yang mengalami peningkatan PDRB di tahun 2021, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 sebesar Rp 83.566,22miliar kemudian naik menjadi Rp 85.072,86 milliar pada tahun 2020. Pertumbuhan

Ekonomi menjadi salah satu indicator dalam melihat kondisi perekonomian berdasarkan data diatas maka dapat kita ketahi bahwa skala perekonomian di Papua lebih besar dari skala ekonomi Provinsi Papua Barat

Upaya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan di Papau juga didukung oleh anggaran biaya yang tertuang dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sebagai anggaran pembiaayaan dari

setiap proram kerja atau kebijakan yang dilakukan seharusnya dapat berdampak positif kepada masyarakat atau mengurangi kemiskinan. Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua pada tahun 2021 adalah sebesar 15,8 miliar dimana sebesar 15,7 miliar digunakan dalam belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah yang menggunakan dana paling besar di susunan APBD Provinsi Papua adalah belanja operasional dengan menghabiskan dana mencapai 11, 4 miliar. Sedangkan Provinsi Papua Barat menghabiskan dana sebesar 9,7 miliar pada tahun 2020, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 9,2 miliar.

Tabel 1.3 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat

	Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat	
	2020	2021
Papua	12.376.326,086	15.758.964,362
Papua Barat	485.365,553	486.191,304

Sumber: Direktorat Jendral Dana Perimbangan, 2023.

Factor lain yang menjadi podasi utama dalam membangun perdaban manusia dan menekan angka kemiskinan di Provinsi Papua adalah kualitas sumber daya manusia. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistika tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua menempati urutan terakhir dari seluruh provinsi di Indonesia. IPM Provinsi Papua sebesar 60,06 jauh dibawah rata-rata IPM Indonesia sebesar 61,39. IPM yang diukur dari kemampuan masyarakat dalam mengakses kesehatan dan umur yang panjang, kemampuan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan standar hidup yang layak dilihat dari makanan, tempat tinggal serta kebutuhan primer lainnya. Sedangkan IPM Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 sebesar 65,26 persen angka ini meningkat sedikit dari tahun tahun 2020, dimana IPM Papua Barat sebesar 65,09 persen. IPM menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat pembangunan disuatu wilayah, kualitas IMP yang bagus disuatu wilayah akan mendorong perkembangan suatu wilayah.

Tabel 1.4 Data IPM Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2015-2021

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2021							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84	60,62	61,39
Papua Barat	61,73	62,21	62,99	63,74	64,70	65,09	65,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik akan sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Secara umum pendapatan biasanya bersumber dari gaji dari pekerjaan, keuntungan usaha, dan keuntungan investasi. Pendapatan manusia menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan, sehingga hal yang umum berkembang dimasyarakat adalah bahwa seorang individu yang sudah masuk usia kerja pada umumnya akan bekerja untuk mendapatkan pendapatan. Permasalahan yang sering terjadi adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah pekerja sehingga mengakibatkan banyak individu yang sudah mampu untuk bekerja tetapi menjadi menganggur. Pengangguran di Provinsi Papua pada tahun 2021 sebanyak 75.658 orang dari total 3,379 juta penduduk Provinsi Papua, sedangkan di Provinsi Papua Barat jumlah pengangguran pada tahun 2021 adalah sebanyak 60.851 orang.

Permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat namun setiap individu masyarakat di provinsi Papua dan Papua Barat juga harus turut serta dalam membangun perekonomian dalam upaya mengurangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor apa saja yang dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga penelitian ini mengangkat judul “**Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2015-2021**”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian membahas hal-hal terkait Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua dan Papua Barat, variabel pada penelitian ini meliputi Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah, Pengangguran dan IPM di Provinsi Papua dengan data yang digunakan bersumber dari BPS dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2021.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat ?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat ?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai hasil kajian yang didukung oleh data yang bersumber dari Lembaga-lembaga resmi, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik guna membantu pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam mengatasi kemiskinan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian ilmiah untuk penelitian-penelitian yang akan datang berkenaan dengan kemiskinan yang terjadi secara umum dan terkhusus kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat.